
**LATAR SOSIAL DAN POLITIK PENGGUNAAN BUSANA ADAT
DAN TATAKRAMA DI SURAKARTA
DALAM *SERAT TATAKRAMA KEDHATON***

Sri Harti Widyastuti
Universitas Negeri Yogyakarta

Abstrak

Busana adat adalah harta kultural yang dimiliki suatu bangsa. Seiring dengan perkembangan zaman, busana adat mengalami kemunduran dalam hal pemakaian. Hal itu akan mengancam kelestariannya. Di beberapa wilayah Jawa Tengah dan DIY busana adat mulai diperhatikan untuk dilestarikan pemakaiannya. Namun demikian, pakem busana adat itu sendiri masih belum begitu jelas. Salah satu pakem yang dapat digunakan untuk merunut dan menjadi acuan adalah manuskrip *Serat Tatakrama Kedhaton*. Serat ini merupakan salah satu manuskrip beraksara dan berbahasa Jawa krama alus yang ditulis oleh Pakubuwana IV dari Keraton Surakarta.

Deskripsi busana adat dan perbedaan pemakaian atribut serta busana untuk para pejabat di Keraton menunjukkan adanya pemilahan stratifikasi sosial dan ekonomi yang cukup baik. Demikian pula perbedaan tatakrama yang diatur untuk para pejabat di keraton Surakarta menunjukkan adanya perhatian yang tinggi terkait dengan kedisiplinan. Penghilangan tatakrama dengan melakukan sembah dari pejabat keraton yang lebih rendah kepada pejabat yang lebih tinggi, menunjukkan adanya upaya Pakubuwana IV untuk mengembalikan pandangan pejabat keraton tentang hakiki kesetiaan dan upaya meluruskan pada siapa manusia menyembah. Hal ini disebabkan Pakubuwana IV merupakan seorang raja Surakarta yang sangat taat dalam ajaran agama Islam.

Kata Kunci: social, politik, adat, tata karma, Serat Tatakrama Kedhaton

Abstract

The traditional clothes is the assets of nation. In several region of Central Java and Yogyakarta, the people begin to pay attention on it. But, the standard of its usage wa not explicit. One of the instruction was used as the sources is *Serat Tatakrama Kedhaton*. This letter was written in Javanese script by Pakubuwana IV from Keraton Surakarta. This research will descrbe how the usage of traditional clothes, from the history of the name, the usage, who used it, and the meaning of the traditional clothes.

Keywords: tradition, Serat Tatakrama Kedhaton

PENDAHULUAN

Dewasa ini eksistensi budaya tradisi makin melemah di masyarakat. Budaya tradisi merupakan budaya yang tumbuh dan diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Budaya tradisi terbagi menjadi budaya keraton dan budaya rakyat. Budaya keraton adalah budaya tradisi yang diciptakan oleh kalangan keraton. Budaya rakyat adalah budaya yang diciptakan dari dan untuk rakyat. Melemahnya budaya tradisi terjadi seiring dengan kemajuan iptek

dan kecenderungan modernisasi di segala bidang. Akibatnya, beberapa jenis budaya tradisi justru sudah menunjukkan kematian. Hal itu tampak pada kematian kesenian tradisi *Gangsir Ngenthir* di daerah Srumbung, Muntilan, Kabupaten Magelang dan kesenian Srandhul di Kecamatan Bokoharjo, Kabupaten Sleman, DIY.

Budaya tradisi melambangkan ciri khas masyarakat penghasilnya. Di samping itu, tercermin pula filosofi, cita-cita, dan pandangan hidup masyarakatnya. Salah satu budaya tradisi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah busana tradisional Jawa. Dalam sejarahnya busana yang paling umum dipakai semua kalangan di Pulau Jawa adalah kain sarung, berupa sehelai kain bercorak dengan panjang 6-8 kaki dan lebarnya 3-4 kaki, dijahit di kedua sisi bentuknya seperti karung tanpa alas yang dijahit (Raffles, 2014: 52). Masyarakat Jawa mempunyai pola-pola busana yang lebih beragam. Untuk petani kebanyakan menggunakan motif *tartan*, untuk kalangan bangsawan lebih menyukai batik Jawa atau kain yang dilukis (Raffles, 2014: 54).

Busana adat adalah busana yang secara turun temurun dipakai oleh kelompok masyarakat pada zamannya dengan ciri-ciri yang menunjukkan lokal budaya diciptakannya busana adat tersebut. Busana adat berkembang selaras dengan perkembangan kebudayaan. Pemakaian busana adat menyesuaikan dengan sistem pemerintahan di mana masyarakat tersebut tinggal. Pada zaman Mataram Islam corak busana tradisional semula sama untuk seluruh wilayah Mataram. Pada pemerintahan Susuhunan Pakubuwana II terjadi perjanjian Giyanti yang diikuti dengan pembagian wilayah Keraton Mataram menjadi dua. Mangkubumi menjadi raja dengan gelar Sultan Hamengkubuwana, mempunyai wilayah dan keraton di Yogyakarta. Sementara, kekuasaan di Keraton Surakarta atau sering disebut kasunanan dipimpin oleh Susuhunan Pakubuwana II (Ngatinah, 2008: 177). Pecahnya Mataram menjadi dua wilayah yaitu Surakarta dan Yogyakarta mengakibatkan semua seragam, yaitu busana kebesaran raja dan keluarganya seperti motif kawung dan busana lurik yang dipakai para prajurit dalem diboyong ke Yogyakarta. Selanjutnya, Keraton Surakarta menerapkan motif lain selain motif kawung sebagai pengganti busana kebesaran raja dan keluarganya dengan motif parang (Ngatinah, 2008: 177). Berdirinya Keraton Yogyakarta melahirkan sejumlah simbol atau atribut kebangsawanan yang berbeda dengan Surakarta. Pada waktu itu kemudian dikembangkan busana adat yang mempunyai corak tersendiri (Condronogoro, 1995: 9-11).

Lebih lanjut (Condronogoro, 1995: 3), menyatakan bahwa busana adat yang dipergunakan untuk upacara-upacara kerajaan dapat dilihat sebagai satu simbol identitas, yang terkait dengan hak dan kewajiban pemakainya. Gesic (dalam Condronogoro, 1995: 4) berpendapat bahwa busana kebesaran di Yogyakarta tetap dipertahankan untuk memperlihatkan wibawa serta keunggulan pemakaian. Apalagi jika busana itu dilengkapi dengan sejumlah barang mewah, mahal, serta langka yang dimiliki oleh beberapa orang saja. Kenyataan tersebut pada dasarnya memperlihatkan superioritas seseorang dalam strata sosial masyarakat. Pigeaud (dalam Condronogoro, 1995: 3) menyebut bahwa perbedaan-perbedaan kecil yang terdapat pada busana adat seperti lebar ornamen pada baju atau lebar garis pada dodot akan menunjukkan derajat yang berbeda bagi

pemakainya. Secara garis besar busana sebagai atribut kebangsawanan dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu busana kegiatan sehari-hari atau kegiatan non formal dan busana untuk sesuatu kegiatan yang dianggap lebih formal atau resmi. Busana resmi terbagi menjadi busana untuk menghadiri upacara *alit* dan busana untuk upacara *ageng*. Dari pengelompokan busana tersebut masih diklasifikasi menjadi busana anak-anak, remaja, dan orang tua (Condronogoro, 1995: 21). Selanjutnya, dalam khasanah busana adat Jawa, dibagi menjadi dua corak busana tradisi, yaitu corak Yogyakarta dan Surakarta. Kedua corak ini mempunyai ciri-ciri yang berbeda. Ciri-ciri ini berasal dari tradisi pakem Keraton Yogyakarta dan Keraton Surakarta.

Dewasa ini busana adat tidak begitu banyak dikenal oleh masyarakat luas, bahkan busana untuk sehari-hari masyarakat Jawa masa lalu pun sudah tidak banyak diketahui. Namun demikian, seiring dengan menguatnya bahasa Jawa sebagai mata pelajaran muatan lokal bahasa Jawa dan kesadaran masyarakat terhadap budaya lokal maka diberbagai daerah di DIY dan Jawa Tengah diberlakukan pemakaian busana adat pada hari-hari tertentu. Sebagai contoh pada hari jadi kota Yogyakarta, hari keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan hari berdirinya Keraton Yogyakarta untuk seluruh pegawai di lingkungan pemda memakai busana adat berupa kebaya dan kain model kutu baru maupun kartini untuk wanita. Sementara, untuk laki-laki memakai surjan berbahan lurik atau katun dengan kain batik. Hal ini berlaku pula pada institusi-institusi yang lebih kecil di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Jawa Tengah.

Serat Tata Krama Kedhaton

Rekam jejak budaya tradisi termasuk busana adat dapat ditemukan dalam naskah atau manuskrip. Manuskrip adalah warisan budaya nenek moyang yang berupa tulisan tangan yang ditulis dengan aksara lokal, bahan untuk menulis juga bahan-bahan lokal, seperti kulit kayu, lontar, *daluwang* maupun kertas. Manuskrip-manuskrip Jawa berisi tentang berbagai bidang misalnya sejarah, silsilah, hukum dan peraturan, wayang, sastra wayang, sastra *piwulang* dan suluk, agama Islam, *primbon* dan *pawukon*, bahasa, musik, tari-tarian, dan adat-istiadat (Behrend, 1990: V). Manuskrip merupakan salah satu objek filologi. Selama ini penelitian-penelitian filologi lebih banyak mengarah pada pengungkapan isi dan perkembangan teori. Sementara itu, isi yang diungkap lebih banyak tentang ajaran dan *piwulang*. Penelitian manuskrip terkait dengan kearifan lokal yang bersifat praktis seperti busana adat belum banyak dilakukan.

Salah satu manuskrip Jawa yang ditulis dengan huruf Jawa berisi tentang busana adat adalah *Serat Tatakrama Kedhaton*. Manuskrip *Serat Tatakrama Kedhaton* mempunyai kode PBA.258 nomer buku MSB/ Piw.32. Penulis teks adalah Pakubuwana IV. Adapun bahasa yang digunakan adalah bahasa ragam *krama alus*, kondisi manuskrip baik hanya terdapat sobekan pada kertas halaman 61.

Berdasarkan deskripsi naskah di atas, maka naskah ini adalah naskah tahun 1788-1820. Terkait dengan penulis manuskrip ini, Pakubuwana IV adalah seorang tokoh penguasa Jawa yang kontroversial dalam pemikiran-pemikiran progresifnya. Berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang diambil sebagai penguasa

Kasunanan Surakarta sering menimbulkan reaksi keras, baik yang mendukung maupun yang menolak di kalangan raja-raja Jawa. Demikian pula di kalangan abdi dalem maupun di pihak kompeni (Muslich KS, 2002: 131). Pakubuwana IV dinobatkan menjadi penguasa Kasunanan Surakarta tahun 1788. Pakubuwana IV merupakan putra dari Pakubuwana II dari perkawinannya dengan Kanjeng Ratu Kencana dan merupakan putra yang ketujuhbelas. Nama kecilnya adalah BRM. Gusti Subadyo atau Sunan Bagus. Diangkat menjadi raja tanggal 29 September 1788 dan wafat tanggal 29 Oktober 1820 (Muslich KS, 2002: 133). Pakubuwana IV, sebagai putra mahkota sudah dipersiapkan sejak muda menjadi pemimpin. Pada awal tahun 1789 Pakubuwana IV menunjukkan ketaatan yang saat kuat terhadap masalah keagamaan, yang kemudian diekspresikan dalam kebijakan-kebijakan yang sangat kuat dalam pemerintahannya. Pakubuwana IV juga membangun masjid yang merupakan masjid tiruan dari masjid Demak. Dengan berdirinya masjid agung di lingkungan keraton maka secara lahiriah dapat dikatakan sebagai sebuah kerajaan yang bercirikan Islam (Muslich KS, 2002: 149). Di samping itu, Pakubuwana IV juga merupakan pujangga yang menulis serat *Wulangreh*, *Cipta Waskitha*, *serat suluk Haspiya*, *Serat Cebolek*, dan *serat Centhini* (Muslich KS, 2002: 169).

Serat Tatakrama Kedaton menceritakan tentang tatacara para abdi dalem dalam berbusana dan berhubungan dengan masyarakat keraton. Adapun tatacara diperuntukkan untuk para abdidalem yang sudah mempunyai pangkat maupun yang belum. Tatacara ini disebut *tatapara*.

Busana Tradisional dalam Serat Tatakrama Kedhaton

Pada pemakaian busana adat para abdi dalem menggunakan busana dan perangkatnya dengan perbedaan-perbedaan kecil. Di samping itu, terdapat tatacara berhubungan mengait dengan kedudukan dan busana yang digunakan.

1. Busana untuk abdi dalem

Untuk para abdi dalem yang memakai *kampuh* atau dodot maka perlu memperhatikan posisi keris. Seperti diketahui istilah *kampuh* dengan dodot sama, yaitu kain batik atau jarit yang lebar dan panjang. Dodot merupakan istilah dari bahasa Jawa Kuna, sementara *kampuh* istilah dari bahasa Jawa krama inggil (Poerwadarminta, 1939: 104). Pemakaian keris tidak boleh dengan cara diselipkan saja, namun dengan aturan-aturan tertentu. *Gandar* atau sarung keris berupa kayu hanya boleh berjarak tiga jariterlihat secara jelas. Akan lebih baik apabila keris masuk ke dalam *kampuh* dan tidak begitu jelas terlihat.

1.2. Pemakaian *Wedhung*

Wedhung adalah senjata tradisional yang kadang-kadang menjadi pusaka berupa pisau besar dengan rangka seperti keris yang digunakan oleh para priyayi. *Simper* yang digunakan untuk mengikat ditentukan hanya selebar telapak tangan.

1.3 Pemakaian *Kepuh*

Kepuh adalah lipatan pada dodot yang terdapat di pinggang atau di punggung bagian bawah atau disebut sebagai *wiron* (Poerwadarminta: 1939: 212). Panjang *kepuh* hanya dua kali lebar telapak tangan.

1.4 Pemakaian *Dodot*

Cara menarik ujung *dodot* dan ukuran tinggi rendah pemakaian *dodot* tergantung pada derajat dan pangkat. Para pangeran boleh memakai *dodot* tiga jari di atas lutut. Tetapi untuk jabatan patih hanya boleh dipakai sampai selutut saja. Adapun ujung *kampuh* yang mempunyai *wiron* di bagian depan boleh dikurangi sedikit selebar telapak tangan. Untuk para bupati wadana kliwon, pemakaian *dodot* dua jari di bawah lutut. *Wiron* di depan tidak boleh sampai terseret bila berjalan, hanya boleh sampai menyentuh tanah. Untuk panewu mantri ke bawah, *wiron* hanya sampai pada mata kaki. Adapun urutan pemakaian menurut pemakainya adalah:

1) Para pangeran putra sentana dalem atau para pangeran putra sanak saudara raja sudah dapat meniru busana raja, seperti misalnya menggunakan motif parang atau motif tengah-tengahan. Motif tengah-tengahan yaitu motif pasangan putih di tengah-tengah ikat kepala, *kemben* atau memakai *kunca*. *Kunca* adalah jatuhnya kain di pojok *dodot*. Hal itu disebabkan oleh adanya anggapan bahwa pangeran sudah dapat dianggap sebagai putra raja.

2) Patih, pada busana untuk patih tidak boleh terlalu banyak *kunca* atau hanya *gubegan* atau tanpa plisir atau pemakaian *kunca* yang terbalik ke atas. *Kampuh* yang digunakan hanya bermotif tumbuhan-tumbuhan merambat atau sayap besar.

3) Bupati adalah pejabat pribumi di karesidenan atau asisten residen (Poerwadarminta, 1939: 54). Wadana adalah pejabat kedistrikan. Kliwon adalah lurah desa (Poerwadarminta, 1939: 652). Bupati wadana kliwon adalah nama jabatan dalam struktur jabatan di wilayah keraton. Untuk para bupati wadana kliwon, *kampuh* yang digunakan bermotif *lunglar ageng* atau motif tumbuh-tumbuhan merambat atau motif sayap atau memakai celana *cindhe*. *Cindhe* adalah bahan sutra berwarna merah bermotif bunga-bunga (Poerwadarminta: 1939: 638). Namun demikian, orang yang berpangkat kliwon apabila memakai *cindhe* harus *sorotan* tidak boleh celana *cindhe* yang *gubegan* atau tanpa plisir. Celana *cindhe* tidak boleh digunakan untuk kepentingan sehari-hari, kecuali hari Senin, Kamis, dan ketika ada upacara atau pertemuan lainnya.

4) Panewu mantri ke bawah, pemakaian celana *cindhe* hanya pada waktu-waktu tertentu. Untuk *kampuh* hanya boleh bermotif *ceplok*. Boleh memakai motif *lunglungan* atau tanaman merambat, namun tidak boleh menggunakan motif sayap dan tidak boleh memakai *blenggen*. *Blenggen* adalah busana yang menggunakan plisir benang emas. *Blenggen* merupakan penanda wahyu keraton, yang artinya para abdi dalem yang sudah memakai *blenggen* sudah diakui mempunyai hubungan dengan darah keraton, sebab orang-orang ini akan menerima akibat bila keraton mengalami hal-hal buruk. Oleh sebab itu, di dalam pertemuan para kliwon dijadikan satu dengan para bendara putra pangeran. Adapun cucu dan buyut ratu yang berjuluk panji setara dengan kedudukan bupati ke bawah. Oleh sebab itu, para bupati sudah dapat satu meja makan dengan ratu ketika bersantap.

2. Tatacara berhubungan dalam Serat Tatakrama Kedhaton

Tatacara ini dibuat untuk menata hubungan para kawula keraton. Dengan dibuatnya tatacara ini menandakan bahwa raja mempunyai kharisma yang tinggi.

a. Tatacara mantri bertemu dengan mantri yang lain

Mantri adalah nama pangkat di keraton dan merupakan sebutan untuk priyayi yang mempunyai berbagai macam pekerjaan di keraton (Poerwadarminta, 1939: 292). Seorang mantri bila bertemu dengan mantri yang lain apabila sedang memakai busana basahan, maka mereka tidak boleh saling bertegur sapa. Peraturan ini juga berlaku bagi panewu.

b. Kaliwon wadana tumenggung saling bertemu

Apabila kaliwon wadana tumenggung saling bertemu dalam keadaan memakai busana *basahan* wajib bagi mereka untuk saling bertegur sapa. Sebaiknya hanya saling mengucapkan salam.

c. Bupati wadana kliwon bertemu dengan panewu mantri.

Panewu adalah pangkat yang agak tinggi atau asisten wedana (Poerwadarminta, 1939: 464). Bupati wadana kliwon bertemu dengan panewu mantri, maka orang yang wajib untuk menyapa adalah yang mempunyai pangkat lebih tinggi, yaitu wadana kaliwon.

d. Pangeran putra sentana dalem bertemu dengan para bupati wadana kliwon

Apabila pertemuan itu di halaman, maka para bupati wadana kliwon tidak wajib untuk jongkok. Apabila panewu mantri bertemu dengan pangeran lalu duduk menghadap keraton. Para panewu mantri tersebut duduk secara berurutan di depan gedung. Apabila bertemu dengan pangeran sentana posisi duduknya lalu maju dan tidak perlu jongkok. Hal itu, disebabkan karena yang menjadi tumpuan kesetiaan adalah keraton, bukan raja.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Sosial Budaya Pemakaian Busana Adat dan Tatacara Adat Keraton dalam Serat Tatakrama Kedhaton

Masyarakat Jawa mengenal perbedaan kelas sosial. Hal itu sudah ada sejak zaman Pulau Jawa ini diperintah oleh raja-raja. Adanya struktur pemerintahan kerajaan menyertai diberlakukannya stratifikasi sosial dalam kehidupan masyarakat. Hal itu menyebabkan apa yang berlaku untuk masyarakat keraton tidak boleh digunakan untuk masyarakat biasa. Hal itu seperti misalnya tentang busana untuk masyarakat biasa, yaitu petani, pedagang, tukang, dan profesi lainnya tidak mempunyai busana adat yang sama dengan masyarakat bangsawan, walaupun untuk acara resmi. Pada masyarakat Jawa laki-laki dari kalangan bawah menggunakan celana kain selutut. Dengan jarit atau kain yang melilit pinggang dan menjuntai melewati lutut. Seperti gaun pendek. Kain ini selalu diikat dipinggang dengan sabuk saat bekerja di sawah atau bepergian, tetapi biasanya dilepas saat bertemu orang yang lebih berkuasa. Pada umumnya orang Jawa dari kalangan bawah memakai semacam kemeja pendek sepanjang siku yang disebut *klambi* warnanya putih atau bergaris-garis hitam putih. Sapu tangan ikat dililitkan di kepala. Pada orang Melayu ikat kepala ini biasanya bermotif kotak. Namun orang Jawa menggunakan kain batik yang cara pemakaiannya lebih menyerupai surban. Sekeliling kepala dililit kain ini dan ujungnya dimasukkan. Ketika berpergian jauh mereka biasanya menggunakan topi lebar dari bilah bambu yang dijaring. Keris dan belati menjadi pelengkap pakaian mereka (Raffles, Thomas Stamford, 2014: 54).

Menilik busana untuk kaum laki-laki, seperti tersebut di atas maka tampak kesederhanaan dan kepraktisan. Hal ini disebabkan busana tersebut digunakan untuk kepentingan busana sehari-hari. Adapun busana wanita untuk masyarakat biasa menggunakan kain yang sama dengan busana laki-laki yang dililitkan hingga mata kaki. Cara mengikatnya berbeda dengan laki-laki. Kain dililitkan mengelilingi tubuh menutupi dada sampai dekat lengan yang disebut dengan *kemben*. Para wanita juga sering kali memakai gaun longgar sepanjang lutut yang biasanya berwarna biru dengan lengan panjang berkancing dipergelangan tangan. Jaket pendek yang dipakai seperti laki-laki yang disebut dengan *klambi*. Wanita biasanya menggulung rambut ke atas yang disebut dengan *gelung* (Raffles, Thomas Stamford, 2014: 54).

Serat Tatakrama Kedhaton ditulis pada zaman Pakubuwana IV. Pada masa tersebut pengaruh kompeni sangat tinggi di dalam kerajaan, bahkan raja dikukuhkan kekuasaannya oleh kompeni. Semua kebijakan dilakukan atas dasar arahan dari kompeni. Namun demikian, bila dicermati pada bentuk desain busana adat *Serat Tatakrama Kedhaton* tidak tampak menonjol pengaruh kompeni. Busana adat dalam *Serat Tatakrama Kedhaton* mempunyai makna simbolik yang sangat tinggi. Simbol-simbol ini merupakan atribut-atribut kerajaan yang menjadi tanda kebesaran kerajaan. Pada zaman Pakubuwana IV pernah mengalami kemunduran bidang politik. Namun, kemunduran ini yang diakibatkan karena kolonialistik tidak berarti kemunduran dan kemerosotan di bawah raja. Realisasi peningkatan prestasi keraton dilakukan dengan melahirkan karya-karya besar di bidang sastra atau dengan mempertegas perbedaan penampilan dengan rakyat biasa (Ngatinah, 2008: 189). Busana adat keraton merupakan salah satu atribut dan pelengkap yang digunakan dalam upacara kerajaan yang sarat dengan simbol-simbol atau perlambangan. Busana adat keraton juga dipakai oleh masyarakat lingkungan keraton dan mencerminkan kedudukan sebagai abdi dalem dari pemakainya. Bagi masyarakat keraton dalam hal berbusana terdapat aturan-aturan yang menentukan, baik dalam pemakaian, motif, maupun model busana yang dikenakan (Ngatinah, 2008: 190). Dijelaskan dalam *Serat Tatakrama Kedhaton* terdapat perbedaan penggunaan motif batik yang digunakan oleh raja dengan yang digunakan oleh patih, pangeran putra sentana, panewu mantri, kaliwon wadana, bupati wadana. Hal itu, menandakan bahwa raja merupakan tokoh sentral, penguasa yang tak terbatas sehingga para raja sering menggunakan gelar-gelar yang sangat panjang, yang merupakan pengejawantahan utusan Tuhan di bumi.

Dalam hal ini raja-raja di Jawa sangat memperhatikan busana adat yang digunakan untuk upacara adat. Hal ini disebabkan upacara adat dan ritual keraton merupakan peristiwa budaya yang penting selama abad 19. Berbagai jenis ritual keraton yang diselenggarakan sepanjang tahun tampak seperti sebuah festival budaya yang tidak ada hentinya. Penyelenggaraan ritual keraton ini sangat membawa implikasi sosial dan ekonomi yang cukup signifikan. Upacara-upacara keraton menuntut partisipasi masyarakat dari berbagai lapisan (Margana, 2010: XXI). Disebabkan oleh busana tradisional yang digunakan untuk kepentingan resmi, maka terdapat perbedaan-perbedaan yang menimbulkan variasi busana yang berimplikasi pada adanya perbedaan kedudukan. Oleh karena itu, maka pakaian

menunjukkan identitas dan kedudukan sebagai contoh seorang patih hanya boleh memakai *dodot* dengan motif *lunglar* besar. Patih adalah seorang yang berhak memerintah memiliki wewenang untuk menyampaikan dan menyempurnakan perintah raja. Dalam undang-undang pranatan disebutkan bahwa patih harus menguasai kondisi kerajaan (Sumodiningrat, 2014: 4)

Demikian pula pemakaian celana *cindhe* dibatasi hanya pada jabatan-jabatan tertentu, seperti misalnya untuk para bupati. Bupati dibawah pada perintah patih dengan otonomi tersendiri. Seorang bupati harus berpedoman pada perintah raja dan patih. Jabatan ini diisi oleh sentana istana, sesuai dengan tingkat keturunannya (Sumodiningrat, 2014: 4). Perbedaan jabatan itu tampak pada pemakaian celana *cindhe* untuk kaliwon menggunakan celana *cindhe sorotan*. Kaliwon menerima perintah dari bupati atau pemimpin pedesaan dan berada di bawah bupati (Sumodiningrat, 2014: 5)

Sementara untuk bupati menggunakan celana *cindhe gubegan* atau tanpa plisir. Celana *cindhe* digunakan hanya untuk acara resmi sementara untuk setiap hari tidak menggunakan celana ini. Sementara itu, untuk para panewu mantri hanya boleh memakai *kampuh ceplok* dan tidak boleh memakai *blenggen* dan juga tidak memakai celana *cindhe*. Panewu adalah mereka yang di bawah kliwon menerima perintah langsung dari kliwon, sementara mantri adalah sesepuh yang memiliki hak wewenang untuk bermusyawarah dengan para pejabat tinggi di istana (Sumodiningrat, 2014: 5).

Pembedaan-pembedaan ini menunjukkan adanya stratifikasi sosial yang cukup tajam. Antara stratifikasi sosial yang satu dengan stratifikasi sosial yang lain diperjelas dengan adanya perbedaan motif atau perlengkapan busana. Perbedaan penggunaan busana tradisional para penguasa Jawa menandakan adanya garis perintah dan kewenangan yang jelas dalam struktur masyarakat keraton. Di satu sisi hal ini sangat baik untuk menciptakan kedisiplinan dan ketaatan. Namun, disisi yang lain terdapat perbedaan sosial dan ekonomi yang cukup besar antar kelas sosial masyarakat. Adanya perbedaan-perbedaan tersebut membuat masyarakat ingin tahu bagaimana deskripsi sesungguhnya busana tradisional untuk para penguasa. Terkait dengan busana adat yang dipakai oleh para penguasa Jawa zaman Mataram Islam, penguasa mengenakan kain jarit dengan panjang 7-8 *kunca*, dan lebarnya 3 kubik. Di mana laki-laki mengenakan disekeliling tubuh bawah mereka seperti menggunakan gaun tetapi cukup longgar sehingga terkadang kakinya tampak saat berjalan bagian yang berada di depan lebih rendah dari bagian yang lain. Sabuk pengikat biasanya terbuat dari sutra dan berpola *cindhe* atau *patoe*. Ketika beristirahat di rumah para pria biasanya mengenakan gaun katun longgar sepanjang lutut. Tetapi saat bepergian atau menghadiri acara umum mereka biasanya mengenakan jaket pendek, dan bahan tebal sutra atau beludru yang dihiasi payet dan kancing-kancing logam. Jaket itu disebut *sikepan* (Raffles, 2014: 55).

Adapun cara berpakaian wanita kalangan atas tidak berbeda jauh dengan wanita petani. Perbedaan hanya dalam kualitas dan keindahan kain, serta hiasan dari cincin emas yang dihiasi batu permata berharga. Wanita kalangan atas tidak

mengenakan hiasan tembaga atau kuningan. Semua wanita kalangan atas mengenakan sandal di dalam rumah.

Berdasarkan deskripsi di atas, maka tampak perbedaan yang cukup signifikan pula pakaian para penguasa Jawa dari keraton di wilayah Jawa, terutama Surakarta pada zaman Mataram Islam. Perbedaan yang sangat tajam ini tidak hanya karena pengaruh kompeni namun, sudah berlangsung cukup lama sejak Jawa diperintah oleh raja-raja dengan sistem birokratis keraton. Dari gambaran ini, maka tampak bahwa keadaan ekonomi rakyat belum mencapai kemakmuran. Apa yang dipunyai oleh penguasa dan golongan bangsawan keraton seolah-olah tidak boleh dipunyai oleh golongan rakyat biasa.

Namun demikian, pada masa pemerintahan Pakubuwana IV hal ini banyak mengalami perubahan. Sebagai seorang raja yang sangat taat beragama Islam, maka tampak pembaharuan-pembaharuan dalam hal tatakrama hubungan antar pejabat keraton, sebagai contoh ketika pangeran putra sentana dalem bertemu dengan para bupati wedana kliwon di halaman, maka tidak perlu untuk berjongkok. Demikian pula sembah sambil berjongkok sudah dihilangkan dalam tatakrama antara panewu mantri bertemu dengan pangeran. Dalam teks disebutkan bahwa penghormatan yang dilakukan oleh orang yang berpangkat derajat orang yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi tidak dilakukan dengan sembah. Hal itu diterangkan dalam teks bahwa para bangsawan dan abdi dalem ini mengabdikan kepada keraton bukan kepada orangnya. Berdasarkan teks yang ada di dalam karya tersebut maka tampak adanya jiwa manajerial yang cukup tinggi yang dimiliki oleh Pakubuwana IV. Hal itu untuk menepis keragu-raguan dari sejumlah pihak di sekitar kehidupan Pakubuwana IV pada waktu itu yang menyatakan bahwa Pakubuwana IV naik tahta terlalu dini yaitu pada usia yang masih muda. Di tengah tekanan kompeni yang demikian kuat pada masa pemerintahan Pakubuwana IV, raja menggiatkan kegiatan bersastra dan kegiatan penulisan buku teks yang sekarang disebut sebagai karya sastra. Demikian pula, peraturan-peraturan dibuat untuk mengatur sistem birokrasi dan rakyat agar menjadi lebih baik. Adat kesopanan ditanamkan melalui perbedaan pemakaian busana tradisi. Di sisi yang lain dengan penandaan atribut masing-masing pada busana bangsawan dan abdi dalem, maka akan menunjukkan kesadaran, kedudukan, dan eksistensi masing-masing.

PENUTUP

Serat Tatakrama Kedhaton memuat tentang busana adat Keraton Surakarta yang dipakai oleh raja beserta patih, bupati, wedana, kliwon, penewu, dan mantri. Pemakaian busana oleh pejabat-pejabat keraton sangat dibedakan. Variasi-varian itu tidak terlampau besar. Namun pembatasannya tampak jelas. Adapun perbedaan-perbedaan tersebut menunjukkan adanya stratifikasi sosial dan perbedaan tugas pada para pemakainya. Demikian pula tatakrama yang digariskan oleh Pakubuwana IV menunjukkan keinginan raja untuk mendisiplinkan pejabat-pejabat keraton.

Pada penghormatan yang dilakukan para pejabat keraton dari pangkat yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi, tampak adanya perubahan. Hal itu dilakukan oleh Pakubuwana IV untuk mengembalikan pandangan para pejabat

keraton bahwa kesetiaan yang harus dirunjukkan para pejabat tersebut, adalah kesetiaan untuk keraton, bukan lagi kesetiaan untuk perorangan. Dihilangkannya penghormatan dengan cara sembah menunjukkan perubahan pandangan Pakubuwana IV terhadap yang patut disembah. Hal tersebut disebabkan karena Pakubuwana IV merupakan raja yang sangat taat kepada ajaran agama Islam.

Daftar Pustaka

- Behrend, T.E. 1990. *Katalog Induk Naskah-naskah Nusantara Jilid 1 Museum Sanabudaya*. Jakarta: Djambatan.
- Condrongoro, Mari S. 1995. *Busana Adat Keraton Yogyakarta*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara.
- Margana, S. *Pujangga Jawa dan Bayang-Bayang Kolonial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Muslich KS. 2006. *Moral Islam dalam serat Piwulang Pakubuwana IV*. Yogyakarta: Global Pustaka Utama Yogyakarta.
- Ngatinah. 2008. Karakteristik Busana Kebesaran Raja Surakarta dan Yogyakarta Hadiningrat Periode 1755-2005. *ITB J. Vis Art and Des*, Vol. 2, No. 2, hlm.173-196.
- Poerwodarminto, WJS. 1939. *Baoesastra Djawa*. Batavia: J.B. Walters' Uitgevers-Maatschappij N.V.
- Raffles, Thomas Stamford. 2014. *The History of Java*. Yogyakarta: Narasi.
- Sumodiningrat, Gunawan dan Ari Wulandari. 2014. *Paku Buwono X*. Yogyakarta: Narasi.